

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut terkait penelitian, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah yang ada di dalam proposal skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti dalam kalimat, dengan harapan memperoleh penjelasan dari makna yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan berjudul **“Pengaruh Sustainable Development Goals (SDGS) terhadap Perkembangan UMKM Melalui Produk Pembiayaan Produktif sebagai Variabel Intervening dikaji dalam Perspektif Islam”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals merupakan sebuah konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), namun secara konseptual terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan sendiri telah dikenal sejak akhir abad ke-20. Menurut Harlem Brundtland yang merupakan ketua World Commission on Environment and Development (WCED) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini, namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Emil Salim menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah

¹ Pengaruh Ukuran Perusahaan et al., “Terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Sosial Reporting (ISR) sebagai Variabel Moderating” (2022).

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.²

3. Perkembangan UMKM

UMKM sendiri adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UUD 1945 dan dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan juga berkeadilan. Kemudian dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro merupakan suatu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

² Aisyah Roziika and R. Nunung Nurwati, 'Pengaruh Penerapan Sustainable Development Goals Terhadap Kependudukan Di Indonesia Dalam Membangun Perekonomian Nasional', *Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran*, 6.1 (2020), 1–16
<https://www.academia.edu/download/63137447/170310180031_Aisyah_Roziika_Jurnal_UTS_Studi_Kependudukan20200429-39754-1cqduf9.pdf>.

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³ UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi penopang perekonomian, dan dalam pengembangannya dibutuhkan banyak penambahan modal agar UMKM dapat tumbuh besar kemudian dapat bersaing dengan usaha-usaha besar, khususnya dalam menghadapi produk impor. Perlu ada keinginan dan dorongan bagi bank syariah untuk menjadikan UMKM sebagai pembiayaan prioritas.⁴ Perkembangan UMKM ini adalah perkembangan atau pertumbuhan usaha-usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah. Perkembangan UMKM dapat dilihat dari semakin maju atau tidaknya usaha seseorang.

4. Produk Pembiayaan Produktif

Produk pembiayaan produktif merupakan suatu program dari dunia perbankan, dimana Bank selaku pihak pembiaya memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Produk pembiayaan produktif ini bertujuan untuk membantu para pengusaha atau pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Lembaga keuangan Islam harus berkontribusi bagi perekonomian ummat dengan karakter yang dimilikinya. Khususnya bank syariah yang merupakan bagian dari ekonomi Islam harusnya banyak memberikan pembiayaan pada sektor produktif khususnya untuk pembiayaan UMKM. Dengan pembiayaan pada UMKM akan nampak keberadaan dan peran bank syariah bagi masyarakat. Kemudian jika bank syariah banyak

³ Yuli Rahmini Suci, 'Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, 1–31.

⁴ Trimulato Trimulato and others, 'Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah Di Indonesia Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020), 1–6.

membiaai sektor UMKM akan menjadi pembeda dengan bank konvensional yang banyak membiayai konsumtif. Bank syariah tidak boleh kalah dari bank konvensional dalam memberikan pembiayaan pada UMKM.⁵

5. Variabel Intervening

Variabel Intervening adalah variabel penghubung atau perantara secara tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati. Dengan adanya variabel Intervening maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen.

6. Perspektif Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal, perspektif disebut juga dengan point of view. Perspektif Islam adalah pandangan dalam agama Islam atau menurut cara pandang Islam.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini perkembangan UMKM tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Menurut data dari Dinas Koperasi UMKM, untuk Provinsi Lampung jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Online Data System (ODS) Diskop UMKM mencatat rata-rata pertumbuhan UMKM di Lampung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota pertahun sekitar 9-10% dari tahun 2021-2022. Pada tahun 2020 jumlah pelaku UMKM sebanyak 110.359, pada tahun 2021 meningkat menjadi 232.800

⁵ Trimulato and others.

⁶ <https://kbbi.web.id/perspektif>

UMKM, dan pada tahun 2022 tercatat lebih dari total UMKM tahun 2021.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah UMKM
2020	110.359
2021	232.800
2022	250.000

Meningkatnya jumlah UMKM ini juga dilatarbelakangi oleh situasi pandemi, dimana banyak para pekerja yang dipecat dan diberhentikan sementara, hal ini membuat para pelaku usaha mencari ide agar tetap bisa melanjutkan hidup ditengah pandemi yang sedang melanda negeri. Bertambahnya minat masyarakat dalam menjalankan bisnis yaitu adanya ruang untuk melakukan bisnis secara online, para pelaku UMKM juga sangat terbantu dengan adanya media sosial yang berbasis digital, sehingga meskipun dalam kondisi pandemi dan keterbatasan beraktivitas, tidak membuat para pelaku usaha berhenti berjualan, bahkan hal ini dapat meningkatkan omzet para pelaku usaha. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurijal Ari, data tersebut dapat berubah-ubah, sebab UMKM bersifat dinamis, sifatnya terus berubah karena ada yang baru namun ada juga yang tidak beroperasi lagi. Data ODS (Operational Data Store) merupakan data yang sudah terdaftar secara resmi dan memiliki Nomor Induk Berusaha (INB). Samsurijal mengatakan, bahwasannya dibandingkan dengan tahun 2019 ke 2020, ada peningkatan jumlah UMKM yang signifikan. Banyak orang putus kerja, dipecat selama pandemi, sehingga ada peningkatan jumlah UMKM. Sedangkan untuk perkembangan UMKM wilayah Bandar Lampung sendiri juga terus meningkat seriap tahunnya, hal ini didukung dengan data ODS UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa UMKM di Bandar Lampung sudah mncapai 118.533 UMKM. Namun, dibalik dari perkembangan usahanya, para pelaku UMKM kerap kali menghadapi tantangan yang dapat menjadi

hambatan bagi usaha yang sedang dijalaninya. Hambatan ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan, baik dalam hal keterbatasan SDM, keterbatasan akses teknologi, keterbatasan kemampuan berstrategi dalam bisnis, dan yang paling utama dan paling banyak dialami oleh para pelaku UMKM adalah keterbatasan permodalan. Perkembangan UMKM merupakan sektor ekonomi yang menjadi penopang perekonomian, dan dalam mengembangkannya dibutuhkan banyak penambahan modal agar UMKM dapat tumbuh besar kemudian dapat bersaing dengan usaha-usaha besar/competitor lain, khususnya dalam menghadapi produk impor. Perlu ada keinginan dan dorongan bagi lembaga keuangan untuk menjadikan UMKM sebagai pembiayaan prioritas.⁷ Perkembangan UMKM ada kaitannya dengan program SDGs. SDGs (Sustainable Development Goals) itu sendiri merupakan pembangunan berkelanjutan, Menurut Harlem Brundtland yang merupakan ketua World Commission on Environment and Development (WCED) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini, namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Emil Salim menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.⁸

SDGs merupakan kelanjutan dari program MDGs (Millennium Development Goals). Berakhirnya MDGs pada tahun 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah

⁷ Trimulato Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany, 'Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10.1 (2021), 19–38 <<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>>.

⁸ Roziika and Nurwati.

membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, gizi buruk, serta beberapa indikator terkait dengan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyelesaikan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis.⁹

Keberadaan dari lembaga keuangan mengambil peran yang cukup vital bagi pengembangan ekonomi serta menggerakkan roda ekonomi memacu pertumbuhan serta mengaktifkan kegiatan ekonomi untuk pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan telah bersinergi dengan berbagai pihak dalam menyusun roadmap bentuk keuangan yang berkelanjutan yang dapat menjabarkan lebih luas dari keadaan yang ada saat ini hal yang ingin dicapai melalui sistem keuangan yang berkelanjutan di Indonesia untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Jangka pendek pada periode (2015-2019) dan jangka panjang pada periode (2015-2024). Untuk lembaga jasa keuangan. Kemunculan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan atmosfer baru bentuk paradigma yang harus dicapai untuk menguatkan kegiatan perekonomian. Dengan porsi keseimbangan antara pemenuhan untuk mendapat keuntungan tujuan profit bukan berarti mengabaikan hal lain seperti dapat merusak lingkungan dan mengupayakan kepedulian terhadap sosial untuk keuntungan yang lebih baik. Dengan keinginan secara global dari banyak lembaga keuangan yang telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs.¹⁰

⁹ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

¹⁰ Sulawesi Island and Sustainable Development Goals, "Penerapan Model Multidimensional Scaling (MDS) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Pulau" 01, no. 01 (2022): 1-19.

Sistem perbankan Syariah sudah seharusnya menjadi sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, oleh karenanya sistem perbankan Islam diharapkan memiliki tujuan kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum serta mewujudkan keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian sehingga program SDGs akan tercapai. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.¹¹

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank guna membantu para pelaku UMKM dalam permodalan, agar usaha yang dijalannya semakin tumbuh dan berkembang serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta dapat mencapai tingkat kesejahteraan. Pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan produktif ini dalam konvensional biasanya dikenal dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat), sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah

¹¹ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

pembiayaan. Upaya Pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM seperti adanya subsidi-subsidi yang diberikan, bantuan Pemerintah dalam mendukung UMKM di Indonesia dalam perbankan yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan melalui Bank. baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Mengingat perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang mengalami kemajuan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan dukungan untuk mendirikan Perbankan Syariah. Dukungan tersebut terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 6 yang bunyinya “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BSI adalah Bank Syariah Indonesia, dimana Bank ini merupakan hasil merger atau penggabungan anatara 3 Bank Syariah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. BSI adalah salah satu Bank yang memiliki banyak produk, salah satunya adalah produk pembiayaan, baik konsumtif maupun produktif. BSI ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. BSI sudah mempunyai banyak cabang di setiap wilayah. BSI juga memiliki produk pembiayaan produktif berupa pinjaman permodalan (KUR) yang dapat membantu para nasabahnya dalam pengembangan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini biasanya ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha dan ingin mengembangkannya menjadi lebih besar atau maju, agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini pastinya nasabah membutuhkan pasokan atau dukungan permodalan yang cukup. Fasilitas KUR ini dapat membantu nasabah yang membutuhkan bantuan permodalan untuk usaha

yang dimilikinya. Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan mikro syariah. Begitu juga dengan BSI yang saat ini melesat menjadi bank terbesar ke-6 di Indonesia. BSI Provinsi Lampung sendiri telah menyalurkan pembiayaan KUR Rp. 423 Miliar pada tahun 2022.

Di dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Jumuah ayat 10, Allah SWT telah memberitahukan kepada para umatnya untuk selalu berusaha mencari rezeki yang halal, salah satunya melalui perniagaan (perdagangan). Sector ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh sector usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Usaha mikro memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya rintangan dan hambatan yang dialami para pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satunya dengan lainnya saling berkaitan antara lain: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.¹²

SDGs mempengaruhi perkembangan UMKM, kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan

¹² Apridhika Rio Chandra, 'Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020, 20 <<http://repository.radenintan.ac.id/9930/1/SKRIPSI2.pdf>>.

kesejahteraan masyarakat. UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pencapaian SDGs. SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang dikenal dengan istilah 5 P yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu People (manusia), Planet (bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (perdamaian), Partnership (kerjasama). Kepala negara dan pemerintah yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan.¹³ SDGs itu sendiri diberlakukan di Negara Indonesia sesuai dengan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 yang dihadiri dan disepakati oleh 193 negara. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati untuk dijalankan memiliki 17 tujuan pokok yang ingin dicapai. Kesejahteraan dalam ekonomi menjadi bagian dari tujuan SDGs yang akan dicapai sampai tahun 2030. Dalam mencapai tujuan-tujuan itu melibatkan banyak pihak untuk bisa meralisasikannya, diantara lembaga relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs adalah lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. SDGs juga memiliki tujuan agar terjadi terjadi pemerataan dalam ekonomi, hadirnya lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Salah satu pencapai yang ingin dicapai dalam SDGs dalam bidang ekonomi yaitu kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan. Bank syariah menjadi bagian

¹³ Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, 'Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia', *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2.September (2015), 1–25.

yang dapat mewujudkan tujuan SDGs tersebut, dengan meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan produktif untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui pembiayaan produktif untuk UMKM bank syariah tidak hanya memberikan layanan akses keuangan tetapi juga memberikan peluang untuk berkembangnya perekonomian dari masyarakat bawah. Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Perputaraan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar. Peran lembaga keuangan syariah dalam mencapai SDGs sangat dibutuhkan khususnya untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Bentuk peran dari lembaga keuangan mikro syariah untuk mencapai SDGs yaitu memberikan modal usaha untuk kelas kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi semua masyarakat. Kemudian memberikan akses layanan yang baik dan berkualitas bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan akses pada produk produk keuangan, termasuk memberikan produk investasi. Lembaga keuangan mikro syariah harus memberikan pemahaman dan mengenalkan bentuk investasi kepada semua masyarakat untuk bisa memperoleh tambahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Pembiayaan produktif diantaranya adalah pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk membiayai konsumsi nasabah (keinginan yang berupa barang konsumtif seperti kendaraan dan lainnya).¹⁴

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan SDGs dengan UMKM dan Pembiayaan Produktif, yang dilakukan oleh Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviany yang berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah” dapat dikatakan bahwa, penyaluran pembiayaan produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Namun dalam penelitian ini dapat diambil

¹⁴ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

kesimpulan bahwa pembiayaan produktif mengalami penurunan pada pembiayaan modal kerja sebesar 0,75%, hal ini dikarenakan upaya pemerintah saja belum cukup untuk tercapainya pemerataan ekonomi guna keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera. Perlu adanya dukungan dari pihak lain yang menyokong agar dapat terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang sedangkan pembiayaan dalam bentuk investasi mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Dan terdapat peningkatan pada pembiayaan konsumtif sebesar 17,13%.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trimulato, Amiruddin, Ismawati, dan Nuraeni yang berjudul “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi prioritas dan pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Novitasari yang berjudul “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam mendukung Sustainable Development Goals” dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha

¹⁵ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

¹⁶ Trimulato and others.

UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti, didapat GAP atau pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek, variable, maupun hasil dari penelitian terdahulu. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali, dengan menambahkan variable, dan objek yang berbeda, sehingga judul yang akan peneliti ajukan adalah **Pengaruh Sustainable Development Goals (SDGS) terhadap Perkembangan UMKM Melalui Produk Pembiayaan Produktif sebagai Variabel Intervening dikaji dalam Perspektif Islam (Studi pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung)**. Dengan periode penelitian 2020-2022, menggunakan triwulan dan data penelitian 30 Sampel berupa UMKM yang melakukan pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan negara dengan jumlah UMKM terbanyak di ASEAN, Saat ini, perkembangan UMKM meningkat setiap tahunnya, tercatat lebih dari 65 juta UMKM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, terdapat 61,7 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta (Tanfund, 2022). Namun dari banyaknya UMKM masi membutuhkan dana bantuan atau tambahan modal guna mengembangkan usaha yang dimiliki. Dimana jasa Lembaga

Keuangan sangat berperan dalam hal ini. Pembiayaan-pembiayaan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan dapat membantu dalam perkembangan UMKM.

2. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan pasar bebas merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Ketika itu terlaksana maka tuntutananya adalah UMKM harus mampu bersaing. Persaingan ini diperlukan perkembangan serta inovasi pada UMKM itu sendiri agar dapat bersaing dikancah Internasional.
3. Industri Keuangan Syariah berperan aktif dalam memfasilitasi permodalan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, tidak terkecuali pada masa pandemic Covid-19.
4. Kurangnya permodalan dan terbatasnya kemampuan SDM seringkali menjadi masalah dan hambatan dalam pengembangan UMKM.
5. Pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih kalah dengan negara lain termasuk negara tetangga, Malaysia. Menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2022, saat ini Indonesia telah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Pada tahun 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada pada peringkat 82 dari 163 negara. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5. Terkait kondisi tersebut, pada September 2022 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendorong kinerja pencapaian SDGs. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional 2024 dapat dicapai lebih cepat dan lebih tepat sasaran.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya, maka penulis menerapkan adanya identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini, baik berupa objek penelitian maupun pokok permasalahan penelitian. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya hanya berkaitan dengan “Analisis Pengaruh Sustainable Development Goals (SDGS) terhadap Perkembangan UMKM Melalui Produk Pembiayaan Produktif sebagai Variabel Intervening dikaji dalam Perspektif Islam”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah SDGs berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
2. Apakah SDGS berpengaruh terhadap pembiayaan produktif?
3. Bagaimana produk pembiayaan produktif berpengaruh terhadap perkembangan UMKM?
4. Apakah SDGS berpengaruh terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung?
5. Bagaimana pengaruh SDGs terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung jika dikaji dalam perspektif Islam?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah SDGs berpengaruh terhadap pembiayaan produktif.
2. Untuk menganalisis apakah SDGs berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.
3. Untuk menganalisis apakah produk pembiayaan produktif berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

4. Untuk menganalisis apakah SDGS berpengaruh terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.
5. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh SDGs terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung jika dikaji dalam perspektif Islam.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai SDGs dan Produk Pembiayaan Produktif yang difasilitasi oleh Bank Syariah khususnya pada objek penelitian yaitu BSI KCP Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu memberikan wawasan mengenai sejauh mana SDGs dan pembiayaan produktif dapat membantu nasabah dan memberikan kemaslahatan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pada objek penelitian khususnya untuk UMKM yang ingin nasabah kembangkan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Serta sebagai sumbangan pemikiran mengenai pengembangan penelitian yang sudah ada dan diharapkan dapat memberi landasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa atau sejenis untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam mengetahui SDGs (Sustainable Development Goals), mengetahui perkembangan UMKM, dan dapat mengetahui produk pembiayaan produktif yang sudah difasilitasi oleh Bank Syariah dalam mempermudah dan membantu para pelaku UMKM saat ini serta dapat memberikan alternatif

- pilihan bagi peneliti dalam menentukan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.
- b. Bagi Bank Syariah dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Manajemen Perbankan Syariah dalam pengembangan serta memajukan pengelolaan Manajemen Perbankan Syariah terutama pada program SDGS agar lebih kompetitif dan mencapai tujuan guna mensejahterakan masyarakat.
 - c. Bagi Pembaca, sebagai salah satu bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dan kajian penelitian terdahulu dilakukan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian membuat perbedaan dengan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany (2021)	Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah	Pembiayaan produktif mengalami penurunan pada pembiayaan modal kerja sebesar 0,75%, hal ini dikarenakan upaya pemerintah saja belum cukup untuk tercapainya pemerataan ekonomi guna keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera. Perlu adanya dukungan dari pihak lain yang menyokong

			<p>agar dapat terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang sedangkan pembiayaan dalam bentuk investasi mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Dan terdapat peningkatan pada pembiayaan komsumtif sebesar 17,13%.¹⁷</p>
2.	Trimulato, Amiruddin, Ismawati, dan Nuraeni (2020)	Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan	Dapat diketahui dan disimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi prioritas dan pembiayaan bank syariah di

¹⁷ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

		Menengah (UMKM)	sektor konsumtif masih dominan. ¹⁸
3.	Maya Novitasari (2019)	Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam mendukung Sustainable Development Goals	Dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs. ¹⁹
4.	Nelti Erwandari (2017)	Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di	Beberapa program yang telah diluncurkan masih perlu dievaluasi kembali agar tercipta hasil yang diinginkan. Selain itu, Provinsi Riau bukan sebagai lumbung padi sehingga untuk mencapai hasil pasti

¹⁸ Trimulato and others.

¹⁹ Maya Novitasari, 'Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals', *Majalah Ekonomi*, 24.1 (2019), 49–58.

		Provinsi Riau	membutuhkan strategi yang tepat dan baik. Upaya peningkatan ketahanan pangan (beras) di Riau belum membuahkan hasil yang signifikan. ²⁰
5.	Adi Nawir, Syamsuddin, dan Jusniaty (2022)	Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali dalam Mengurangi Kemiskinan	Dapat disimpulkan bahwa, implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Program telah dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa tentang pelaksanaan Program SDGs. Bahkan padahal Program SDGs masih dalam tahap perencanaan bagaimana keberlanjutannya program yang akan dilakukan, terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Goals (SDGs) memang masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Polewali, melainkan pelaksanaannya telah terlaksana dengan baik. Dilihat dari Pemerintah Desa yang telah melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat dengan melakukan pemutakhiran data sekali dalam 3 bulan. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah sendiri untuk melaksanakan perencanaan desa dimulai dari perencanaan pembangunan

²⁰ Nelti Erwandari, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau" *Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2017): 875–888.

			<p>dan strategi yang harus dilakukan khususnya dalam bidang kemiskinan. Pemerintah Desa Polewali dalam melaksanakan program SDGs untuk mengurangi kemiskinan telah melakukan hal-hal yang mampu menurunkan angka kemiskinan di Desa Polewali sesuai dengan tujuan program SDGs, yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, memastikan akses ke layanan desa, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.²¹</p>
6.	<p>Eva Nur Agustin, Rossa Shafira Nur Sabrina, Shifa Aulia Maghfiroh, Marina Ery Setiyawati (2022)</p>	<p>Analisis Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Meningkatkan Keuangan dan Derajat Kesehatan di Indonesia</p>	<p>Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menyadari pentingnya Usaha Menengah (UMKM) untuk pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mereka untuk menyediakan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan hubungan sosial, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, pemberdayaan</p>

²¹ Adi Nawir, Syamsuddin, and Jusniaty, 'PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN', *DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Malang*, 2.1 (2022), 1–18.

			UMKM juga diharapkan mampu dalam mengembangkan ekonomi guna tercapainya salah satu program sustainable development goals Indonesia untuk tahun 2030. Dengan adanya pengaruh yang signifikan juga memberikan manfaat yang efektif dari sektor kesehatan yaitu terdapat peningkatan pada kualitas kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. ²²
7.	Astri Putri Utami, Arista Rahmahita dan Deris Dermawan, (2022)	UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia	Hasil pada penelitian ini adalah UMKM dapat mengatasi badai ekonomi dengan peningkatan jumlah orang yang dipekerjakan di UMKM di seluruh negeri dari 96,99% menjadi 97,22% pada 2012 hingga 2017. UKM dinilai dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan lapangan kerja dan upah, sehingga dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. ²³
8.	Rosma Simangunsong, (2022)	Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah UMKM memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2018. Dampak usaha kecil, menengah dan

²² Marina Ery, 'KESEHATAN DI INDONESIA', 3 (2022), 628–37.

²³ M. Fuad Fahrudin Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, 2.8.5.2017 (2022), 2003–5.

			mikro terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 80,2%. ²⁴
9.	Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, Mahfudz Reza Fahlevi (2021)	Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel	Panelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial maupun secara simultan pembiayaan syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Apabila pembiayaan syariah dan IPM meningkat, maka akan berpengaruh pada turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. ²⁵
10.	Sedinadia Putri (2021)	Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian, potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usahanya. ²⁶

²⁴ Rosma Simangunsong, 'Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Wadah Ilmiah Penelitian Pengabdian Untuk Nommensen*, 1.1 (2022), 78–84 <<https://jurnal.uhnp.ac.id/wippun/article/view/227>>.

²⁵ Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, and Mahfudz Reza Fahlevi, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1409–15 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2602>>.

²⁶ Sedinadia Putri, 'Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), 1–11.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama membahas atau meneliti mengenai pengaruh SDGs yang bersedang berlangsung sampai tahun 2030 mendatang, Terdapat variabel yang sama dengan variabel penelitian terdahulu seperti UMKM, produk pembiayaan produktif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat perbedaan pada objek penelitian, variabel, jumlah tahun yang diambil, serta perbedaan pada metode penelitiannya, dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Pada bab landasan teori dan pengujian hipotesis ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan tentang teori digunakan dalam mendukung penelitian, SDGs (Sustainable Development Goals), perkembangan UMKM, pembiayaan produktif, variabel intervening, dan perspektif Islam, selain itu pada bab ini juga membahas hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji T Parsial, uji F Simultan, metode analisis data, Path analisis atau analisis jalur.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian, menguraikan mengenai hasil dan pembahasan tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan analisis data dan penelitian serta rekomendasi dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi mengenai kumpulan referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Pada hakekatnya, kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang macam-macam perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasinya untuk membangun ekonomi di negara tersebut. Dalam pembahasan juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.

Menurut Sadano Sukirno, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mempelajari tentang tujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara mengatasi masalah, agar Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya untuk berkembang lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah agar dapat membangun ekonomi dengan lebih cepat.²⁷

2. *Theory Sustainability Maturity Model*

Sustainability Maturity model dalam pandangan Baumgartner dan Ebner adalah pendekatan yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi masalah berkelanjutan, strategi keberlanjutan, strategi keberlanjutan, model bisnis baru, dan ekonomi sirkular²⁸ menggunakan

²⁷ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2015), 423-425

²⁸ Ahmad, Lutfi, 2020

konsep ini untuk strategi kemampuan berkelanjutan yang berkaitan dengan karakteristik strategi berkelanjutan. Oleh sebab itu ditetapkan isu-isu kunci berkelanjutan sebagai nilai jangka panjang yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan secara efisien.

Nilai jangka panjang dapat ditingkatkan secara konsisten dalam kinerja organisasi yang dapat menerapkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Biasanya berdasarkan pada standar 3P yaitu people, profit dan planet, disisi lain ada acara yang dapat digunakan terkait penetapan strategi keberlanjutan, missal strategi yang focus pada orientasi internal/eksternal dari komitmen berkelanjutan.

Keberlanjutan atau sustainability berasal dari kata bahasa inggris yaitu sustain yang berarti terus dan ability yang berarti kemampuan. Keberlanjutan sama dengan sustainability dalam bahasa Indonesia. Menurut Brundlant keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Ahmad dan Lutfi menyatakan keberlanjutan memiliki arti mampu memenuhi perkembangan masa kini tanpa harus mengorbankan hak-hak masa depan. Keberlanjutan memiliki 3 pilar, yang dikenal dengan 3P (Profit, Planet, People) dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.²⁹

3. *Theory Stakeholder*

Definisi stakeholder menurut Freeman dan MCVea adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi dan kebijakan. Menurut Freeman dalam Susanto dan Tarigan, teori stakeholder adalah teori mengenal prganisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. Deegan mengatakan bahwa stakeholder theory adalah teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang

²⁹ Ahmad, Lutfi, 2020

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan.

Selain itu Robbins dan Coulter mengemukakan bahwa teori stakeholder merupakan teori yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau lembaga. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Stakeholder dapat diartikan sebagai semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

Menurut Jones menjelaskan bahwa stakeholder dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a) Inside stakeholder, terdiri atas orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pemegang saham dan karyawan
- b) Outside stakeholder, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh perusahaan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat local, dan masyarakat secara umum.

4. SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs dan dampaknya bagi organisasi bisnis telah berkembang secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Agenda 2030 merupakan kesepakatan antara 193

Negara Anggota PBB untuk memperkenalkan seperangkat strategi umum untuk mencapai 17 tujuan (Pembangunan Berkelanjutan Goals, atau SDGs), 169 target, dan 241 indikator dalam skala global sebelum tahun 2030. SDGs mengikuti dari Tujuan Pembangunan Milenium Development Goals (MDGs), yang mewakili upaya pertama untuk menciptakan strategi untuk memudahkan pembangunan negara-negara termiskin. Namun, MDGs telah dikritik karena hasilnya yang tidak memadai, yang disebabkan oleh negara-negara bagian yang tidak setara. Untuk menghindari kekurangan serupa, pengenalan SDGs telah diikuti oleh ex-ante evaluasi untuk mengidentifikasi kemungkinan inovasi yang akan membuat pencapaian mereka lebih mungkin (Sachs, 2012).³⁰

Sustainable Development Goals memang merupakan sebuah konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), namun secara konseptual terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan sendiri telah dikenal sejak akhir abad ke-20. Menurut Harlem Brundtland yang merupakan ketua World Commission on Environment and Development (WCED) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini, namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Emil Salim menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.³¹ Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang

³⁰ Simone Pizzi and others, 'Management Research and the UN Sustainable Development Goals (SDGs): A Bibliometric Investigation and Systematic Review', *Journal of Cleaner Production*, 276 (2020), 124033 <<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124033>>.

³¹ Roziika and Nurwati.

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.³²

Target dan indikator SDGs tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik (Panuluh & Fitri, 2016). Namun tidak semua indikator sesuai untuk Indonesia, dan juga ditingkat daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Selain itu Tim Sekretariat Nasional SDGs (Bappenas) juga telah menyusun panduan metadata nasional. Terdapat 319 indikator nasional yang sudah diidentifikasi.

Ada 17 indikator dari SDGs (Sustainable Development Goals) itu sendiri, yaitu :

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Penurunan Angka Kematian
4. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
5. Kesenjangan Gender
6. Pendidikan Berkualitas
7. Air Bersih dan Sanitasi Layak
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan dan Ketimpangan
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

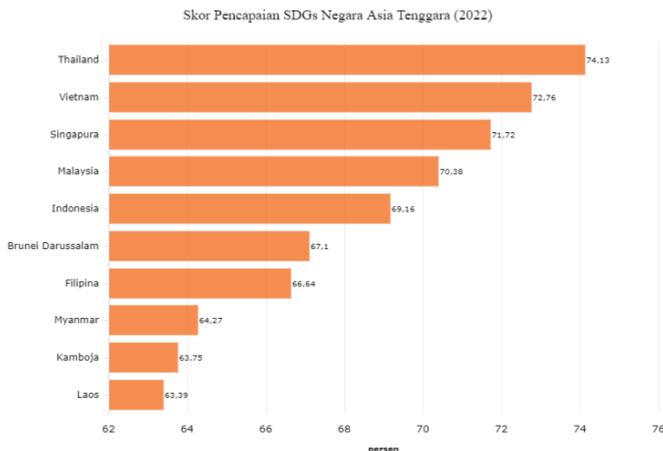
Di Indonesia, 17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu ; pilar sosial, pilar ekonomi, pilar

³² <https://sdgs.bappenas.go.id>, 22 Agustus 2017, diakses pada tanggal 10 November 2022

lingkungan, pilar hukum dan tata kelola. Dimana diantara 17 indikator di atas, yang bersangkutan dengan penelitian ini adalah pilar ekonomi yang terdapat pada indikator tujuan ke 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan indikator tujuan SDGs.

Indikator dari pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri ada 10 target, salah satu yang berkaitan dengan penelitian ialah menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.³³

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan pengaruh SDGs terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif sebagai variabel intervensi dikaji dalam perspektif Islam (studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung) .



Gambar 2.1
Skor Pencapaian SDGs Negara Asia Tenggara Tahun 2022

³³ Indonesia mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs pada tahun 2022. Pembangunan Berkelanjutan, '*Pilar Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan*', 53–64.

Menurut Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2022, saat ini Indonesia telah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Pada tahun 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada pada peringkat 82 dari 163 negara. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 seperti terlihat pada grafik.

Terkait kondisi tersebut, pada September 2022 Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk mendorong kinerja pencapaian SDGs. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional 2024 dapat dicapai lebih cepat dan lebih tepat sasaran,

a. Perkembangan UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan mikro syariah. Di dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Jumuah ayat 10, Allah SWT telah memberitahukan

kepada para umatnya untuk selalu berusaha mencari rezeki yang halal, salah satunya melalui perniagaan (perdagangan).

Sektor ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Usaha mikro memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya rintangan dan hambatan yang dialami para pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan lainnya saling berkaitan antara lain: kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.³⁴ Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” . .

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution,2013:105). Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi priode tahun 1997 hingga 1998, dan hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Stastistik merilis keadaan tersebut

³⁴ Chandra.

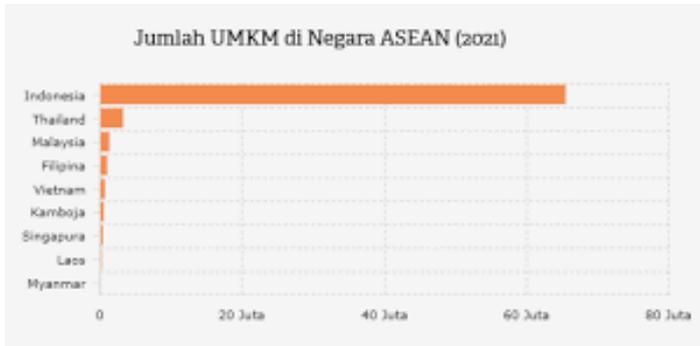
pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru terus meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja samapai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang.

Salah satu sektor yang berpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasioanal dari perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI&BI,2015:1). Semua keberhasilan yang telah dicapai oleh memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan untuk dicarikan solusi yang terbaik.

Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas. Kekawatiran ini dilandasi bahwa

Indonesia akan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan pasar bebas. Ketika itu terlaksana tuntutanannya adalah UMKM harus mampu bersaing. Harapan Pemerintah ketika pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations yang dimulai pada akhir Tahun 2015 perlu dilakukan persiapan secara terintegrasi dan komprehensif, agar pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional.

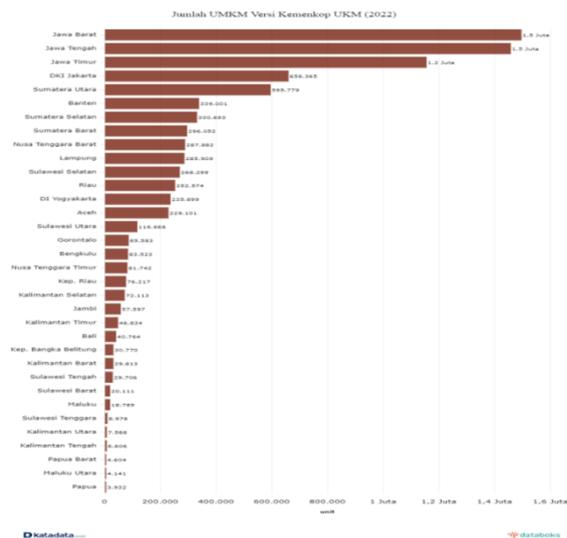
Pada saat seluruh dunia mengalami krisis ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19, usaha yang terus bisa berdiri di Indonesia adalah UMKM, dimana meskipun terjadi pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat di luar rumah, namun UMKM dapat meminimalisir hal tersebut tanpa harus menutup usahanya, para pelaku UMKM melakukan terobosan baru dengan berdagang online atau lewat media sosial dengan mengandalkan jaringan internet. Para pelaku UMKM berhasil melakukan terobosan tersebut bahkan sampai pasca pandemi pun banyak masyarakat yang menyukai terapan berdagang online ini. Dimana hal ini dirasa cukup membantu mereka dalam melakukan aktivitas lainnya atau dapat membantu mereka yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya toko online, karena mereka tidak harus datang ke tempat, dan tetap bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terbukti dengan adanya terobosan berdagang online, UMKM dapat tetap berjalan disituasi apapun bahkan saat terjadi pembatasan aktivitas di luar rumah. UMKM merupakan penopang perekonomian Negara, UMKM sangat berpengaruh dan perlu adanya dukungan-dukungan baik dari pihak pemerintah, lembaga keuangan dan lainnya agar UMKM dapat terus berkembang.



Gambar 2.2

Indonesia sebagai Negara yang mempunyai UMKM terbanyak di ASEAN

Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini, perkembangan UMKM tercatat lebih dari 65 juta UMKM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016, terdapat 61,7 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta (Tanfund, 2022).



Gambar 2.3

Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2022

Menurut data Dinas Koperasi UMKM, untuk Provinsi Lampung jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Data Online (ODS) Diskop UMKM, rata-rata pertumbuhan UMKM di Lampung yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota per tahun sekitar 9-10% dari tahun 2021-2022. Tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 110.359, tahun 2021 meningkat menjadi 232.800 UMKM, dan tahun 2022 lebih banyak dari total UMKM tahun 2021. Peningkatan jumlah UMKM juga dilatarbelakangi oleh situasi pandemi, dimana banyak pekerja yang ditangkap dan dihentikan sementara, hal. Hal ini membuat para pebisnis mencari ide agar bisa terus hidup di tengah pandemi yang melanda tanah air. Meningkatnya animo masyarakat dalam menjalankan bisnis yaitu dengan adanya ruang untuk berbisnis secara online, UMKM juga sangat terbantu dengan adanya media sosial berbasis digital, sehingga meski dalam masa pandemi dan aktivitas yang terbatas tidak membuat pelaku usaha terhenti. jualan, ternyata hal ini dapat meningkatkan omzet para pelaku usaha. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, Samsurijal Ari, data ini bisa berubah, karena UMKM itu dinamis, sifatnya terus berubah karena ada yang baru tapi ada juga yang sudah tidak beroperasi. Data ODS (Operational Data Store) adalah data yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki Nomor Induk Usaha (INB). Samsurijal mengatakan jika dibandingkan tahun 2019 ke 2020, terjadi peningkatan jumlah UMKM yang cukup signifikan. Banyak orang yang putus kerja, terjebak di masa pandemi, sehingga terjadi peningkatan jumlah UMKM.

Tabel 2.1
Jumlah UMKM Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
Kota Bandar Lampung	118.533
Kota Metro	23.854
Kab. Tanggamus	186
Kab. Lampung Selatan	701
Kab. Lampung Timur	650
Kab. Lampung Tengah	796
Kab. Lampung Utara	457
Kab. Lampung Barat	2.741
Kab. Way Kanan	850
Kab. Tulang Bawang	633
Kab. Tulang Bawang Barat	210
Kab. Pesisir Barat	1.041
Kab. Mesuji	4.287
Kab. Pringsewu	2.319
Kab. Pesawaran	482

Perkembangan UMKM di wilayah Bandar Lampung sendiri juga terus meningkat setiap tahunnya, hal ini didukung dengan data UMKM ODS Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia bahwa UMKM di Bandar Lampung telah mencapai 118.533 UMKM. Namun dibalik berkembangnya usaha, para pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan yang dapat menjadi kendala bagi usaha yang dijalankannya. Kendala tersebut biasanya disebabkan oleh keterbatasan, baik dari segi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan akses teknologi, keterbatasan kemampuan strategis dalam berbisnis, dan yang paling utama dan paling dialami oleh para pelaku UMKM adalah keterbatasan modal.

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah parameter yang dapat diukur sehingga bersifat maya yang sulit untuk dapat

dipertanggungjawabkan. Semakin kongkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut. Para peneliti (Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles at all 2000, Hadjimanolis 2000) menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha. Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

1) Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambahkan kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Modal usaha terdiri dari tiga macam, yaitu:

a) Modal Sendiri

Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, dan lain sebagainya.

b) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Sumber dana dari modal asing yaitu pinjaman dari perbankan dan pinjaman dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi, pegadaian, atau lembaga pembiayaan.

c) Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal orang lain

2) Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Dalam prakteknya, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

a) Kondisi dan Kemampuan Penjual

Jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini, penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni :

- Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan.
- Harga produk.
- Syarat penjualan seperti : pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, perlu memperhatikan jumlah

serta sifat-sifat tenaga penjualan yang akan dipakai. Dengan tenaga penjualan yang baik dapatlah dihindari timbulnya rasa kecewa pada para pembeli dalam pembeliannya.

b) Kondisi Pasar Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar internasional.
- Kelompok pembeli atau segmen pasarnya.
- Daya belinya.
- Frekuensi pembeliannya
- Keinginan dan kebutuhannya.

3) Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (Bagian Penjualan) yang dipegang oleh orang-orang tertentu atau ahli dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar.

4) Faktor Lain

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Adapun

pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa “paling penting membuat barang yang baik”. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama.

5) Keuntungan Usaha

Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif). Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

6) Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau man power adalah kelompok penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, golongan lain-lain atau menerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh karena itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai potensial labour force. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri

sendiri ataupun untuk anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Penyerapan tenaga kerja menjelaskan tentang hubungan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki dengan tingkat upah. Permintaan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diminta karena orang tersebut dapat meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan kemudian dijual kepada konsumen. Adanya penambahan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bergantung kepada penambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan factor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

7) Cabang Usaha

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat pada satu saja.

Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan berusaha memberikan masukan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Peneliti tersebut diantaranya

dilakukan oleh Supriyanto (2006:1) menyimpulkan dalam penelitiannya, ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan Presiden Yudhoyono pada tanggal 26 Pebruari 2005, terdapat empat jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan yaitu, penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro.

Kemudian peneliti Darwanto (2013:142- 149) melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu lebih panjang. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kelembagaan dalam mendorong inovasi dan kreativitas pelaku UMKM. Paper ini hasil pemikiran dengan penelitian pustaka dan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya tulisan ini melakukan komparasi strategi

menciptakan kelembagaan yang kuat bagi penciptaan kreativitas dan seni yang mampu meningkatkan daya saing UMKM dari beberapa negara. Permasalahan UMKM terkait dengan produktivitas antara lain kurangnya perlindungan terhadap hak cipta atas inovasi dan kreativitas.

Peneliti Sholhuddin (2013: 496-500) dengan melihat peran serta pemerintah namun di sektor perbankan khususnya syariah dalam pengembangan produk jasanya bagi untuk membantu perkembangan UMKM. Perbankan syariah mengambil peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan supporting dalam masalah pendampingan teknis and non teknis. Secara kualitatif memang perbankan syariah sudah melakukan berbagai strategi yaitu inovasi strategi pembiayaan, program Linkage, Pilot project, pemanfaatan dana sosial, kerjasama technical assistance. Namun secara kuantitatif ternyata peran perbankan syariah terhadap UMKM masih belum memuaskan. Banyak pihak mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syariah terhadap UMKM. Padahal sistem keuangan syariah nasional mempunyai permasalahan fundamental yang menyebabkan berbagai pihak terkait mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi syariah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Tantangan utama lembaga keuangan syariah adalah menyelesaikan permasalahan fundamental tersebut yang terdiri dari kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir permissive akibat lingkungan kehidupan kapitalistik.³⁵

Dalam pandangan agama Islam, perdagangan atau perniagaan sudah ada dari zaman Rasulullah

³⁵ Yuli Rahmini Suci.

SAW, dimana sudah ada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang membahas tentang perdagangan atau perniagaan. Dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)

Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa kejujuran merupakan modal terbaik dalam perdagangan, seperti dalam beberapa sabda beliau : Dari ‘Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja’di Al-Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi Saw telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi Saw dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi Saw mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sekali pun), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Dalam Al-Mughni ‘an Hamlil Asfar, Al-Hafizh Al-Iraqi pada hadist no.1576 membawakan hadist “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki”.

Dalam hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan secara spesifik

aturan yang membatasi minimal maupun maksimal prosentase keuntungan dari penjualan barang yang harus dipatuhi oleh pedagang. Bahwa prosentase keuntungan diserahkan sepenuhnya pada keadaan barang, pedagang, dan perniagaan dengan mengedepankan etika ekonomi syariah, seperti halnya rasa cukup, welas asih, dan menghindari rasa tamak. Dan masih banyak dalil yang menganjurkan kegiatan transaksi bebas ghisysy (menipu), rekayasa harga, keuntungan dan barang, serta bebas dari ihtikar barang dan membuat zalim baik kepentingan khusus maupun umum. Ajaran Islam sangat melarang para stake holder atau pelaku usaha yang dengan sengaja menaikkan harga barang dagangan dengan sebab-sebab tertentu, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan ihtikar dalam sebuah perdagangan jual beli.

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecualli diterangkannya.” (HR Thabrani dan Ahmad). “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.” (HR Al-Tirmidzi, AlDarimi, Al-Daruqutni) . “Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan.” (HR. Al- Bukhari). Dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW sangat menjunjung profesional dalam berdagang. Sehingga menjadi petunjuk kepada kita bahwa kejujuran dalam transaksi jual-beli adalah representatif termasuk muslim yang benar-benar muslim atau tidak.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan adalah Pembiayaan atau disebut financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kebutuhan yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu:

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Indikator dari pembiayaan produktif adalah

1. Kelayakan usaha

- Prosedur Pembiayaan
- Persyaratan Pembiayaan
- Agunan Pembiayaan

2. Pengembangan Usaha

1) Pembiayaan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, dan Untuk keperluan perdagangan atau untuk peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek, ataupun panjang yang diperuntukan bagi para pengusaha atau yang memiliki usaha yang sedang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Pembiayaan modal kerja biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan membayar biaya produksi, membeli bahan baku, perdagangan barang dan jasa, pengerjaan sebuah proyek pembangunan, dan

lain sebagainya. Pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal ini menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Program pembiayaan modal kerja syariah bias didapatkan oleh perorangan atau organisasi yang membuka atau memiliki usaha yang dinilai bias memiliki prospek, tidak melanggar syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi barang- barang modal (capital goods) serta fasilitas- fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.³⁶

2) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (seperti pembelian barang-barang konsumsi, kendaraan, dan lainnya)

Dalam Perbankan Syariah biasanya menyediakan fasilitas pembiayaan, baik pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Perlu ada kesungguhan dari perbankan syariah untuk bisa mendukung sektor rill khususnya kegiatan produktif mikro kecil dan menengah. Untuk menjaga konsistensinya sebagai lembaga yang akan menopang dan berkontribusi bagi Negara. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang punya peran sebagai lembaga intermediasi yang banyak melakukan transaksi dengan masyarakat. Sebaiknya bank syariah dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustanaible Development Goals/SDGs). Khususnya dalam tercapainya kesejahteraan di tengah masyarakat secara merata. Kegiatan pembiayaan pada sector produktif pada UMKM dapat dilakukan di Bank Syariah. Sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam bahwa harta tidak sekedar dinikmati

³⁶ Cisneros Ortega Sara Patricia, 2021, III.

dan berputar pada suatu golongan tertentu. Perlu adanya atau dilakukan kegiatan riil khususnya pada sektor riil UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan produktif untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Melalui pembiayaan produktif untuk UMKM bank syariah tidak hanya memberikan layanan akses keuangan tetapi juga memberikan peluang untuk berkembangnya perekonomian dari masyarakat bawah. Pembiayaan produktif yang diberikan kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Perputaraan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh para pengusaha besar. Bank syariah memiliki pembiayaan produktif UMKM yang dapat berperan mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Melalui pembiayaan produktif UMKM bank syariah tidak hanya memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan peluang berkembangnya UMKM. Pembiayaan produktif UMKM bank syariah akan meningkatkan pendapatan, ekonomi, dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Kesejahteraan yang sama menjadi tujuan dari SDGs.³⁷ Pembiayaan oleh bank syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Besarnya tingkat pembiayaan bermasalah memungkinkan bank untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, hal tersebut berdampak pada besaran dana yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi berkurang. Maka dari itu perlu adanya prosedur sebelum melakukan pembiayaan dan memperhatikan 5C+1S,

³⁷ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

*yaitu character, capacity, capital, collateral, condition dan syariah.*³⁸

Hadits Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Majjah seperti dikutip dari Hadith Compact Disk Sunan Ibnu Majjah, kitab Attijarah, bab Asyirkah hadits nomor 2280

“Nabi bersabda: tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan pencampuran biji-bijian dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk terjual.” (HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib).³⁹

c. Variabel Intervening

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.⁴⁰

d. Perspektif Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal, perspektif disebut juga dengan point of view. Perspektif Islam adalah pandangan dalam agama Islam atau menurut cara pandang Islam. Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu masalah, dalam hal ini perspektif Islam adalah cara pandang agama Islam terhadap suatu masalah atau persoalan yang terjadi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin mengetahui

³⁸ S Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih, ‘Strategi Bisnis Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makasar’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1293–1305.

³⁹ Arbelaez-cruce Shell, 2016, 1–23.

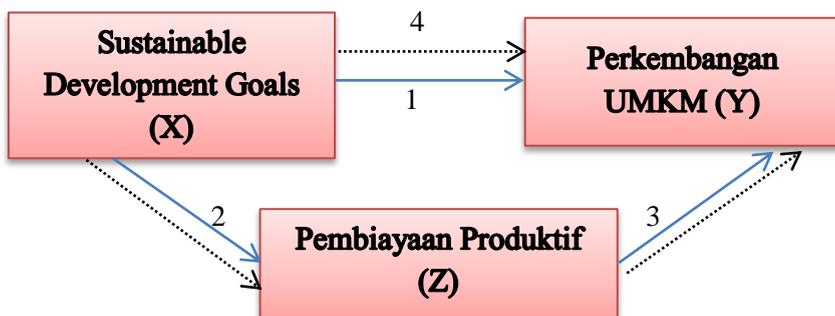
⁴⁰ Semiconductor Technology, (2016), 1–7.

mengenai judul yang peneliti ambil dilihat dari cara pandang agama Islam.⁴¹

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dapat dikatakan sebagai rumusan rumusan masalah yang sudSah di buat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkn beberapa konsep dan juga proposisiyang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. (Sugiono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan di teliti. Secara teoritis harus dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen , bila dalam penelitian ini ada variabel intervening maka perlu di jelaskan mengapa variabel tersebut dilibatkan dalam penelitian ini.⁴² Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel, Sustainable Development Goals sebagai variabel X, perkembangan UMKM sebagai variabel Y, dan pembiayaan produktif sebagai variabel Z atau variabel Intervening.



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

⁴¹ Perusahaan and others.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang merupakan jawaban sementara, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris/nyata. Untuk itu penelitian perlu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.

1. Pengaruh SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap Perkembangan UMKM

SDGs yang tinggi maka dapat menunjukkan perkembangan UMKM dan kesejahteraan para pelaku UMKM dan dapat tercapainya SDGs, karena tujuan dari SDGs adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trimulato, Nur Syamsu, Mega Octaviany (2021) dengan judul penelitian yaitu “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah” mengungkapkan bahwa pembiayaan produktif menurun dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif, sehingga dapat dikatakan SDGs terhadap pembiayaan produktif ini masih belum optimal. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maya Novitasari Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Novitasari (2019) yang berjudul “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam mendukung Sustainable Development Goals” dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs.⁴³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Agustini, Rossa Shafira Nur Sabrina, Shifa Aulia

⁴³ Novitasari.

Maghfiroh, Marina Ery Setiyawati (2022), yang berjudul “Analisis Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Meningkatkan Keuangan dan Derajat Kesehatan di Indonesia”, berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menyadari pentingnya Usaha Menengah (UMKM) untuk pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mereka untuk menyediakan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan hubungan sosial, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga diharapkan mampu dalam mengembangkan ekonomi guna tercapainya salah satu program sustainable development goals Indonesia untuk tahun 2030. Dengan adanya pengaruh yang signifikan juga memberikan manfaat yang efektif dari sektor kesehatan yaitu terdapat peningkatan pada kualitas kesehatan serta derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astri Putri Utami, Arista Rahmahita dan Deris Dermawan, (2022), yang berjudul “UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia”, pada penelitian ini dikemukakan bahwa UMKM dapat mengatasi badai ekonomi dengan peningkatan jumlah orang yang dipekerjakan di UMKM di seluruh negeri dari 96,99% menjadi 97,22% pada 2012 hingga 2017. UKM dinilai dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan lapangan kerja dan upah, sehingga dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁴⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosma Simangunsong (2022), yang berjudul “Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap

⁴⁴ Ery.

⁴⁵ Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin.

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah UMKM memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010-2018. Dampak usaha kecil, menengah dan mikro terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 80,2%.⁴⁶

Sustainable Development Goals memang merupakan sebuah konsep tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), namun secara konseptual terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan sendiri telah dikenal sejak akhir abad ke-20. Menurut Harlem Brundtland yang merupakan ketua World Commission on Environment and Development (WCED) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini, namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Emil Salim menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.⁴⁷

SDGs yang tinggi maka dapat menunjukkan perkembangan UMKM dan kesejahteraan para pelaku UMKM dan dapat tercapainya SDGs, karena tujuan dari SDGs adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astri Putri Utami, Arista Rahmahita dan Deris Dermawan, (2022), yang berjudul “UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia”, pada penelitian ini dikemukakan bahwa UMKM dapat mengatasi badai ekonomi dengan peningkatan jumlah orang yang dipekerjakan di UMKM di seluruh negeri dari 96,99% menjadi 97,22% pada 2012 hingga 2017. UKM dinilai dapat meningkatkan

⁴⁶ Simangunsong.

⁴⁷ Roziika and Nurwati.

perekonomian dengan meningkatkan lapangan kerja dan upah, sehingga dapat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si (2021) dengan judul “Digitalisasi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pencapaian SDGs”, menyimpulkan hasil dari penelitian bahwa bisnis UMKM memiliki kekuatan dan fleksibilitas tinggi, khususnya besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB atau PDRB, besarnya penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha yang besar dan menyebar, serta investasinya yang besar. Digitalisasi UMKM dalam beberapa bentuk, seperti digitalisasi pemasaran, keuangan, logistik, dan lainnya akan dapat membawa berkembangnya bisnis UMKM lebih baik melalui pemanfaatan potensi besar yang dimilikinya, tetapi harus disertai etika bisnis dan penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Masih terdapat kendala yang harus terus diperbaiki dalam diri UMKM, seperti belum tingginya kualitas SDM dalam manajemen bisnis, penguasaan dalam IT, kepemilikan peralatan pendukung digitalisasi, serta akses dan penguasaan keuangan. Kemajuan bisnis UMKM akan meningkatkan perekonomian, dan pencapaian SDGs. Perkembangan pariwisata serta ketersediaan website pemerintah daerah dan pelaku UMKM menjadi faktor pendukung pengembangan ekonomi, yang sangat tergantung pada majunya bisnis UMKM. Allah Swt., menjadikan dan menyediakan bumi seisinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia (Q.S Al-A’raf ayat 10). Pengembangan bisnis merupakan salah satu cara manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui perbaikan kondisi ekonomi melalui cara-cara yang halal. (Q.S An-Nissa’ ayat 29-30). Tetapi pengembangan bisnis hanya akan berhasil jika dikelola oleh orang yang ahli dibidangnya /bisnis. (HR. Al Buqori). Diperlukan sumber

⁴⁸ Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin.

daya manusia yang berkualitas dalam mengembangkan bisnis.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yaitu:

H0 : Tidak adanya pengaruh antara SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap perkembangan UMKM.

H1 : Adanya pengaruh antara SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap perkembangan UMKM.

2. Pengaruh SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap Produk Pembiayaan Produktif

SDGs (Sustainable Development Goals) dapat berpengaruh terhadap produk pembiayaan produktif, karena dengan adanya SDGs dan target-targetnya maka membuat pemerintah dan lembaga keuangan akan memberikan akses guna mencapai tujuan-tujuan dari SDGs, salah satunya adalah pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM dan mendukung kegiatan produktif, menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.⁴⁹ Dengan hal ini maka, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan guna memfasilitasi dalam rangka pengembangan UMKM ini sangat berperan untuk para pelaku usaha, sehingga usahanya dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany (2021), yang berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah”, berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa, pembiayaan produktif mengalami penurunan pada pembiayaan modal kerja sebesar 0,75%, hal ini

⁴⁹ Berkelanjutan.

dikarenakan upaya pemerintah saja belum cukup untuk tercapainya pemerataan ekonomi guna keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera. Perlu adanya dukungan dari pihak lain yang menyokong agar dapat terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang sedangkan pembiayaan dalam bentuk investasi mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Dan terdapat peningkatan pada pembiayaan komsumtif sebesar 17,13%.⁵⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Novita Sari (2019), yang berjudul “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals”, dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para penguasa UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif.

⁵⁰ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs.⁵¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Supriadi, Asyraf Mustamin, St. Hafsah Umar, dan Surya Ningsih (2021), yang berjudul “Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar”, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian pertumbuhan PT Bank Panin Dubai Syariah pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 mengalami peningkatan pada aset sebesar 7,6 persen, dan untuk pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -44 persen. Pada produk giro tumbuh sebesar 11 persen, tabungan tumbuh sebesar 27 persen, dan deposito mengalami penurunan -7,9 persen. Strategi bisnis yang diterapkan PT Bank Panin Dubai Syariah di Masa pandemi covid-19, meningkatkan layanan kantor dengan penerapan protokol kesehatan, peningkatan layanan berbasis digital, fasilitas ATM, Mobile Banking dan Cash Management System ditingkatkan untuk penuhan transaksi nasabah. Untuk pembiayaan recovery terhadap pembiayaan yang terkena dampak covid-19 agar dapat pulih kembali, serta tetap melakukan penawaran produk dan penetrasi untuk menjangar pembiayaan baru.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yaitu:

- H0 : Tidak adanya pengaruh antara SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap pembiayaan produktif.
- H2 : Adanya pengaruh antara SDGs (Sustainable Development Goals) terhadap pembiayaan produktif.

⁵¹ Novitasari.

⁵² Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih.

3. Pengaruh produk pembiayaan produktif terhadap perkembangan UMKM.

Akses atau fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti pembiayaan produktif ini memiliki peran penting dalam membantu perkembangan UMKM. Dimana para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal dan ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya dapat terlaksana dengan adanya pembiayaan ini. Hal ini juga berkaitan dengan berkurangnya pengangguran dikarenakan usaha yang terus berkembang dapat berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi para pengangguran, dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga masyarakat dapat memiliki hidup yang layak dan sejahtera. Namun dari beberapa penelitian bahwa fasilitas yang ada dilembaga keuangan ini masih ada yang belum optimal dalam pembiayaan produktif, dikarenakan masih didominasi dengan pembiayaan konsumtif seperti pembelian barang-barang, kendaraan, dan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sedinadia Putri (2021), yang berjudul “Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa, potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal agar mampu mengembangkan usahanya.⁵³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, Mahfudz Reza Fahlevi (2021), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel”. Dapat dikemukakan hasil penelitian bahwa, secara parsial maupun secara simultan pembiayaan syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negative dan

⁵³ Putri.

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Apabila pembiayaan syariah dan IPM meningkat, maka akan berpengaruh pada turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.⁵⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Amiruddin, Ismawati, dan Nuraeni (2020), yang berjudul “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, dapat disimpulkan bahwa, optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi prioritas dan pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yaitu:

H0 : Tidak adanya pengaruh antara produk pembiayaan produktif terhadap perkembangan UMKM.

H3 : Adanya pengaruh antara produk pembiayaan produktif terhadap perkembangan UMKM.

4. Pengaruh SDGS terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.

SDGs (Sustainable Development Goals) dapat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM secara tidak langsung melalui produk pembiayaan produktif, karena dengan adanya SDGs dan target-targetnya maka membuat pemerintah dan lembaga keuangan akan memberikan akses guna mencapai tujuan-tujuan dari SDGs, salah satunya adalah pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM dan mendukung kegiatan produktif, menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong

⁵⁴ Rohmi, Jaya, and Fahlevi.

⁵⁵ Trimulato and others.

formalisasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.⁵⁶ Dengan hal ini maka, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan guna memfasilitasi dalam rangka pengembangan UMKM ini sangat berperan untuk para pelaku usaha, sehingga usahanya dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany (2021), yang berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah”, berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa, pembiayaan produktif mengalami penurunan pada pembiayaan modal kerja sebesar 0,75%, hal ini dikarenakan upaya pemerintah saja belum cukup untuk tercapainya pemerataan ekonomi guna keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera. Perlu adanya dukungan dari pihak lain yang menyokong agar dapat terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang sedangkan pembiayaan dalam bentuk investasi mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Dan terdapat peningkatan pada pembiayaan konsumtif sebesar 17,13%.⁵⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Novita Sari (2019), yang berjudul “Optimalisasi Potensi

⁵⁶ Berkelanjutan.

⁵⁷ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals”, dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para penguasa UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs.⁵⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Supriadi, Asyraf Mustamin, St. Hafsa Umar, dan Surya Ningsih (2021), yang berjudul “Strategi Bisnis Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makassar”, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian pertumbuhan PT Bank Panin Dubai Syariah pada periode Mei 2020 sampai dengan Mei 2021 mengalami peningkatan pada aset sebesar 7,6 persen, dan untuk pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar -44 persen. Pada produk giro tumbuh sebesar 11 persen, tabungan tumbuh sebesar 27 persen, dan deposito mengalami penurunan -7,9 persen. Strategi bisnis yang diterapkan PT Bank Panin Dubai Syariah di Masa pandemi covid-19, meningkatkan layanan kantor dengan penerapan protokol kesehatan, peningkatan layanan berbasis digital, fasilitas ATM, Mobile Banking dan Cash Management System ditingkatkan untuk penuhi transaksi nasabah. Untuk pembiayaan recovery terhadap pembiayaan yang terkena dampak covid-19 agar dapat pulih kembali, serta

⁵⁸ Novitasari.

tetap melakukan penawaran produk dan penetrasi untuk menjaring pembiayaan baru.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yaitu:

H0 :Tidak adanya pengaruh antara Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif.

H4 : Adanya pengaruh antara Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif.

5. Pengaruh SDGS terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung dikaji dalam perspektif Islam.

Pengaruh SDGs terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton dikaji dalam perspektif Islam, yang dimaksud adalah bagaimana pandangan Islam mengenai SDGs terhadap perkembangan UMKM dengan melalui pembiayaan dari BSI KCP Kedaton Bandar Lampung. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam memperbolehkan adanya jual beli atau perniagaan, dalam agama Islam pun mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan dari kebijakan SDGs itu sendiri, yaitu mensejahterakan kehidupan kini dan generasi mendatang. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya perusakan alam, serta harus memanfaatkan alam sebaik-baiknya agar generasi yang akan datang dapat juga menikmati atau mendapatkan kefalahan. Islam juga telah memperbolehkan adanya pembiayaan berupa pembiayaan syariah yang di dalamnya terdapat akad sesuai prinsip syariah. Para ulama ahli *fiqih* dari berbagai madzhab telah berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan tuntas tentang akad ini. Walau terjadi perbedaan ungkapan dalam mendefinisikan akad ini, akan tetapi semuanya mengarah

⁵⁹ Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih.

kepada suatu pemahaman yang sama, yaitu “suatu akad serikat dagang antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya”.⁶⁰

Perniagaan juga sejalan dengan pandangan atau perspektif Islam yaitu sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa ayat 29).

Di antara hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dapat menjadi dasar akad mudharabah ialah hadits Abdullah bin Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

⁶⁰ Dr. Zaid bin Muhammad ar-Rummaani, *Aqdul Mudharabah Fil Fiqhil Islamy*, 14.

mendapatkan separuh dari hasil panennya. ”(HR. Muttafaqun ‘alaih).

Ibnu Hazm berkata, “*Al-Qiraadh (al-Mudharabah)* telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi kuasa untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah diutus, beliau pun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya.⁶¹

Imam al-Marghinani al-Hanafi berkata, “Akad mudharabah dihallowkan, karena benar-benar diperlukan oleh umat manusia. Karena di antara manusia ada orang-orang yang kaya akan harta benda, akan tetapi ia tidak pandai untuk mengelolanya. Sebagaimana di antara mereka ada orang-orang yang lihai dalam mengelola kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Dengan demikian, sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kaya (tapi tidak berpengalaman) dan orang yang cerdas (tapi tidak memiliki modal), orang yang miskin (tapi lihai) dan orang yang dungu (tapi kaya) dapat terwujud.⁶²

Dengan ini baik SDGs, perdagangan dan pembiayaan sejalan dengan agama Islam dikarenakan dalam islam pun mempunyai tujuan dalam menyejahterakan umat, dan mencapai target kefalahan. Sedangkan dalam Islam sangat mendukung kegiatan produktifitas dan keberlangsungan usaha, dengan

⁶¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, 247.

⁶² Al-Marghinaani Al-Hanafi, *Al-Hidayah Syarah al-Bidaayah*, 202.

melakukan perniagaan atau perdagangan atas asas suka sama suka tanpa paksaan dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany yang berjudul “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah”, dengan hasil penelitian pembiayaan produktif mengalami penurunan pada pembiayaan modal kerja sebesar 0,75%, hal ini dikarenakan upaya pemerintah saja belum cukup untuk tercapainya pemerataan ekonomi guna keberlangsungan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejahtera. Perlu adanya dukungan dari pihak lain yang menyokong agar dapat terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangkul pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat, pelaku usaha, hingga kaum muda dalam berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Karena, tujuan utama digagasnya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana pembangunan yang mendatangkan kesejahteraan dapat dipertahankan untuk masa depan atau generasi mendatang sedangkan pembiayaan dalam bentuk investasi mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Dan terdapat peningkatan pada pembiayaan komsumtif sebesar 17,13%.⁶³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trimulato, Amiruddin, Ismawati, dan Nuraeni, yang berjudul “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan produktif Bank Syariah untuk UMKM masih belum optimal karena pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak menjadi

⁶³ Trimulato, Syamsu, and Octaviany.

prioritas dan pembiayaan bank syariah di sektor konsumtif masih dominan.⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Novitasari, yang berjudul “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi UMKM Halal dalam mendukung Sustainable Development Goals”, Dapat diambil kesimpulan bahwa, kondisi Bank Syariah dalam mendukung UMKM halal belum melakukan sosialisasi yang efektif kepada para pengusaha UMKM halal, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit ditemui serta kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, sementara potensi bank syariah itu sendiri dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku industri wisata serta melakukan event yang menarik agar dapat merubah mindset masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang inklusif dan bukan eksklusif. Sehingga dalam hal ini Perbankan Syariah belum optimal dalam mendukung SDGs.⁶⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis atau dugaan sementara dari hasil penelitian yaitu:

H0 : Tidak adanya pengaruh antara Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton dikaji dalam perspektif Islam.

H5 : Adanya pengaruh antara Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton dikaji dalam perspektif Islam.

⁶⁴ Trimulato and others.

⁶⁵ Maya Novitasari, ‘Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, *Majalah Ekonomi*, 24.1 (2019), 49–58.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Sustainable Development Goals mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Selain itu jika dibandingkan dengan nilai signifikansi penelitian yang sebesar 0,027 pada hasil output SPSS, lebih kecil jika dibandingkan 0,05. Berdasarkan nilai beta (Standardized coefficients), besarnya pengaruh produk pembiayaan produktif terhadap perkembangan UMKM adalah 0,210. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima dan berpengaruh positif signifikan. Dari hasil yang telah didapat dari lapangan, memang dengan adanya kebijakan SDGs ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan dimasa mendatang, dikarenakan dengan adanya kebijakan ini otomatis akan memberikan perhatian khusus mengenai tujuan dan target dari kebijakan SDGs itu sendiri, yang salah satunya adalah mendorong dan mendukung kegiatan produktifitas usaha mikrokecil dan menengah, dimana secara tidak langsung akan memberikan dampak pada para pelaku usaha yang sedang membutuhkan bantuan berupa permodalan yang dapat dibantu oleh lembaga keuangan untuk menyalurkan dan memberikan fasilitas pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja bagi para pelaku UMKM sehingga dapat mengembangkan usahanya dan dapat memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Maka dengan adanya kebijakan SDGs ini dapat berpengaruh positif pada perkembangan UMKM.
2. Sustainable Development Goals mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton Bandar Lampung. Selain itu jika dibandingkan dengan nilai signifikansi penelitian yang sebesar 0,035 pada hasil output SPSS, lebih kecil jika dibandingkan 0,05. Berdasarkan nilai beta (Standardized coefficients), besarnya

pengaruh produk pembiayaan produktif terhadap pembiayaan produktif adalah 0,266. Dengan ini dapat disimpulkan dan ditentukan bahwa hipotesis 2 diterima dan berpengaruh positif signifikan. Dapat dilihat juga bahwa dengan adanya kebijakan SDGs ini pun dapat berpengaruh pada pembiayaan produktif, dimana dengan adanya SDGs maka pembiayaan akan dimudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan uluran dukungan berupa permodalan, hal ini pun dapat berpengaruh positif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena dengan adanya kebijakan SDGs maka dapat memberikan akses atau kemudahan akses ke lembaga keuangan, karena itu merupakan salah satu dari target capaian SDGs sehingga dapat berpengaruh pada pembiayaan produktif.

3. Pembiayaan produktif mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Selain itu jika dibandingkan dengan nilai signifikansi penelitian yang sebesar 0,037 pada hasil output SPSS, lebih kecil jika dibandingkan 0,05. Berdasarkan nilai beta (Standardized coefficients), besarnya pengaruh produk pembiayaan produktif terhadap pembiayaan produktif adalah 0,173. Dengan ini dapat disimpulkan dan ditentukan bahwa hipotesis 3 juga diterima dan berpengaruh positif signifikan. Dimana hal ini dapat dibuktikan dengan semakin berkembangnya usaha para nasabah pembiayaan setelah mendapatkan bantuan berupa permodalan dari pihak bank. Terdapat perubahan signifikan pada usaha yang mereka punya dan merasakan perbedaannya sebelum dan setelah mendapatkan bantuan permodalan dari bank. Pembiayaan produktif juga dapat menjadi jembatan dalam memberikan solusi terhadap usaha yang membutuhkan suntikan permodalan guna mengembangkan usahanya.
4. Sustainable Development Goals (SDGs) dapat berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif. Hal ini tentu sejalan dengan hipotesis 4, dimana SDGs ini dapat mempengaruhi

perkembangan UMKM secara tidak langsung melalui pembiayaan produktif, jadi pembiayaan produktif ini menjadi jembatan bagi terlaksananya target dan tujuan SDGs serta tercapainya perkembangan usaha-usaha. Dengan berkembangnya usaha dan menurunnya tingkat kesenjangan serta mendapat pekerjaan yang layak, hal ini dapat memberikan dampak yang baik bagi tercapainya target SDGs, serta dapat memberikan kemudahan akses ke lembaga keuangan, sesuai dengan tujuan dan target dari SDGs itu sendiri.

5. Sustainable Development Goals (SDGs) dapat berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap perkembangan UMKM melalui produk pembiayaan produktif pada BSI KCP Kedaton. Jika dilihat dari perspektif islam, sejalan dengan tujuan dan target dari SDGs itu sendiri, jadi dalam hal ini menurut pandangan agama Islam bahwa tujuan dan target SDGs sejalan dengan tujuan agama Islam, sama-sama ingin mencapai keadilan atau kemakmuran bagi masyarakat, tentunya tentang sesuai aturan syariah. Namun untuk statement dalam mendukung optimalisasi produktifitas usaha mikro kecil dan menengah BSI KCP Kedaton belum optimal dalam menyalurkan produk pembiayaan produktif jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtifnya, hal ini menyatakan bahwa nasabah BSI KCP Kedaton masih didominasi oleh masyarakat konsumtif jika dibandingkan dengan produktifnya dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan produktif dan dapat menyeimbangkan porsi antara pembiayaan produktif dan konsumtif, sehingga dapat membantu lebih banyak para pelaku usaha yang sedang kesulitan pada sector permodalan, tentunya harus tepat sasaran dan dipantau mengenai keadilan yang didapat atau dirasakan oleh para pelaku UMKM. Sehingga dapat memantau sejauh mana perkembangan UMKM dan kesejahteraan pada pelaku UMKM. Dengan demikian semakin banyak berkembangnya UMKM dan hal ini dapat memberikan keadilan atau kesejahteraan serta

dapat memberikan pekerjaan yang layak, maka tujuan dari SDGs itupun dapat tercapai.

B. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diberikan yaitu :

1. Bank Syariah Indonesia dalam hal ini harus lebih meningkatkan dalam pemberian pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja bagi para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, dan mempunyai keterbatasan dalam hal permodalan. Sehingga pembiayaan dapat merata dalam membantu para pelaku usaha, dan dapat menjadi wadah untuk terbukanya lapangan pekerjaan yang layak sehingga dapat mencapai tujuan utama dari SDGs dimasa mendatang.
2. Perlunya pengalokasian dana modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan usaha, sehingga dapat mencapai perkembangan suatu usaha yang diinginkan. Sehingga dengan adanya pembiayaan modal kerja diharapkan dapat membantu kelanjutan produktifitas usaha dan dapat memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
3. Perlunya kemudahan akses layanan ke lembaga keuangan sehingga, pembiayaan yang diberikan tepat sasaran pada pelaku usaha yang sedang membutuhkan dukungan dari bagian permodalan usaha atau modal kerja.
4. Perlunya pencatatan dari pihak bank dalam perkembangan usaha-usaha yang mendapatkan pembiayaan berupa modal kerja, sehingga pihak bank dapat dengan mudah menilai apakah pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, serta dapat memudahkan dalam menilai apakah tujuan SDGs yang berhubungan dengan akses layanan perbankan atau lembaga keuangan sudah tercapai atau belum.
5. Perlu adanya sosialisasi lebih merata pada masyarakat mengenai adanya fasilitas pembiayaan modal kerja khususnya pada Bank Syariah Indonesia untuk para pelaku usaha yang

mempunyai kendala dan kesulitan dalam hal permodalan dalam mendukung perkembangan produktifitas usaha yang dimilikinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin, 2.8.5.2017 (2022), 2003–5
- Berk elanjutan, Pembangunan, ‘Pilar Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan’, 53–64
- Chandra, Apridhika Rio, ‘Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018’, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020, 20
<[http://repository.radenintan.ac.id/9930/1/Skripsi 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9930/1/Skripsi%20.pdf)>
- Coleman, Bernard D., and Raymond M. Fuoss, ‘Quaternization Kinetics. I. Some Pyridine Derivatives in Tetramethylene Sulfone’, *Journal of the American Chemical Society*, 77.21 (1955), 5472–76
- Erwandari, Nelti, ‘Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau’, *Ilmu Hubungan Internasional*, 5.3 (2017), 875–88
- Ery, Marina, ‘Kesehatan di Indonesia’, 3 (2022), 628–37
- Ghozali, and Chairil, ‘Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility’ *Jurnal Nominal*, *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility* *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, 2012, Hlm.24, 1.1 (2012), 17–68
- Haniah, Nisrina, ‘Uji Normalitas Dengan Metode Liliefors’, *Statistika Pendidikan*, 1, 2013, 1–17
- Hum, M, Achmad Musyahid, and M Ag, ‘Populasi dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Masyarakat 5 . 0 Di Kota / Kabupaten X) Makalah Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Metodologi Penelitian Hukum Dosen Pengampu : Hindu Umiyati Program Pascasarjana Jurusan

- Dirasah Islam’, June, 2021, 1–25
- Island, Sulawesi, and Sustainable Development Goals, ‘Penerapan Model Multidimensional Scaling (MDS) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Pulau’, 01.01 (2022), 1–19
- Muafiah, Andi Firdha 8.5 (2019), 55
- Nasri, Al Fadilla Darma, ‘Pengaruh Penerapan E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Bengkulu)’, 2020, 24
<[http://repository.iainbengkulu.ac.id/4704/1/Skripsi al-fadlilah.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4704/1/Skripsi_al-fadlilah.pdf)>
- Nawir, Adi, Syamsuddin, and Jusniaty, ‘Penerapan Program Development Goals (SDGs) Desa Polewali dalam Mengurangi Kemiskinan’, *Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Malang*, 2.1 (2022), 1–18
- Novitasari, Maya, ‘Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals’, *Majalah Ekonomi*, 24.1 (2019), 49–58
- Octovido, Irsandy, ‘Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15.1 (2014), 1–7
- Patricia, Cisneros Ortega Sara, 2021, III
- Perusahaan, Pengaruh Ukuran, D A N Profitabilitas, Studi Kasus, Pada Perusahaan, and Issi Periode, ‘Terhadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Sosial Reporting (ISR) sebagai Variabel Moderating’, 2022
- Pizzi, Simone, Andrea Caputo, Antonio Corvino, and Andrea Venturelli, ‘Management Research and the UN Sustainable Development Goals (SDGs): A Bibliometric Investigation and Systematic Review’, *Journal of Cleaner Production*, 276 (2020), 124033
- Putri, Sedinadia, ‘Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan

- Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), 1–11
- rnández, S. R., Castro Morales, L. G., & MaldonaArciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hedo Gudiño, C. W. (2021). Intelligenza emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma de Los Andes. *Revista Conrado*, 17(78), 127-133., 3.2 (2021), 6
- Rohmi, Misfi Laili, Tiara Juliana Jaya, and Mahfudz Reza Fahlevi, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1409–15
- Roziika, Aisyah, and R. Nunung Nurwati, 'Pengaruh Penerapan Sustainable Development Goals Terhadap Kependudukan Di Indonesia Dalam Membangun Perekonomian Nasional', *Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran*, 6.1 (2020), 1–16
- Sekar Panuluh, and Meila Riskia Fitri, 'Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia', *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2.September (2015), 1–25
- Shell, Arbelaez-cruce, , 2016, 1–23
- Simangunsong, Rosma, 'Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Wadah Ilmiah Penelitian Pengabdian Untuk Nommensen*, 1.1 (2022), 78–84
- Sinaga, Ika Misdayanti, Adelina Lubis, and Ahmad Prayudi, 'Pengaruh Internet Financial Reporting (Ifr) Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI)*, 1.2 (2020), 106–11
- Technology, Semiconductor, '2.
 elibrary.de/10.5771/9783845276175/das-2-3-2-modell>

Trimulato, Trimulato, K Amiruddin, Ismawati Ismawati, and Nuraeni Nuraeni, 'Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah Di Indonesia Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020), 1–6

Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany, 'Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM Di Bank Syariah', *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10.1 (2021), 19–38

Trimulianto, supriadi, Mustamin, A & Ningsih, S, 'Strategi Bisnis Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Makasar', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), 1293–1305

Yuli Rahmini Suci, 'Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 2008, 1–31

<https://kbbi.web.id/perspektif>. Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 09 Januari 2023.

<https://kbbi.web.id/perspektif>. Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 09 Januari 2023.

<https://sdgs.bappenas.go.id> Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 10 Januari 2023.

<https://databoks.katadata.co.id> Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 10 Januari 2023.

<https://ppid.lampungprov.go.id> Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 10 Januari 2023.

<https://www.kupastuntas.co> Diakses pukul 20.00 WIB Pada Tanggal 10 Januari 2023.